



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/257/AA.05/2017 Tanggal 26 Januari 2015, Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 yang memuat rekomendasi agar lebih mengefektifkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, dengan cara melakukan perubahan dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama agar lebih relevan, spesifik dan terukur sesuai dengan arah tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengatur indikator kinerja utama sebagai alat ukur dan menjadi pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4614);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 39);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen yang khususnya membandingkan tingkat kinerja yang mencapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
7. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah pada masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
14. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari satu program yang merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
15. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
16. Indikator Kinerja Utama (*key performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan Organisasi dalam mencapai suatu sasaran strategis.
17. Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang yang selanjutnya disebut IKU Kota adalah IKU yang disusun oleh tim dan ditetapkan oleh Walikota Singkawang.
18. Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah IKU yang disusun oleh perangkat daerah dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.

19. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Daerah/ perangkat daerah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu yang telah direncanakan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENETAPAN IKU

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU di lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang adalah:

- a. untuk memperoleh informasi yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan benar; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Ruang lingkup penetapan IKU adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang selaku organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PEMILIHAN DAN PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang wajib menyusun dan menetapkan IKU.
- (2) IKU pada tingkatan perangkat daerah meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) serta merupakan komitmen ukuran pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan kinerja perangkat daerah yang disusun dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.
- (3) IKU pada tingkat Pemerintah Daerah merupakan indikator pengukur yang dapat mencerminkan keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kota sesuai dengan sasaran strategis pada

rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan oleh Walikota.

- (4) Pemilihan dan Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. keselarasan indikator antar tingkatan unit organisasi, sejalan dan selaras dengan indikator tingkat Pemerintah Kota;
 - b. dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang dianggap masih relevan;
 - c. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
 - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - e. kebutuhan data statistik pemerintah Kota; dan
 - f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan memadai guna pengukuran kinerja suatu perangkat daerah dan memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan suatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB IV

PENGGUNAAN, PENERAPAN DAN RIVIU IKU

Pasal 5

- (1) Sebagai alat pengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tingkat Pemerintah Daerah maka ditetapkan IKU Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat daerah dalam penerapan IKU perangkat daerah agar searah dan selaras dengan IKU Kota.
- (3) Perangkat daerah penanggung jawab IKU Kota sebagaimana tercantum dalam lajur empat Lampiran Peraturan Walikota ini selaku perangkat daerah pengampu tugas berkewajiban menghimpun, mengolah, dan melaporkan pencapaian IKU Kota yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Penerapan IKU pada tingkat perangkat daerah ataupun tingkat Kota harus diriviu secara berkala dalam 2 (dua) tahun sekali untuk mengetahui tingkat relevansi dan efektifitas IKU terhadap tujuan sasaran pemerintah.
- (2) Riviu IKU untuk tujuan tertentu dapat dilakukan terhadap hal:
 - a. tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh tim Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. terdapat perubahan arah kebijakan pemerintah Kota dalam menentukan arah pembangunan; dan
 - c. terdapat perubahan program dan kegiatan yang secara output dan outcome sebagai pendukung capaian IKU.
- (3) Riviu IKU Kota dan perangkat daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota dari unsur Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah dan perangkat daerah lainnya yang secara langsung berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

BAB V

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Koordinasi dan pengembangan dalam penetapan IKU dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta dibantu oleh Kepala PERANGKAT DAERAH dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 Juli 2017

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 11 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd
SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


YASMALIZAR, S.H

NIP.19681016 199803 1 004

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENJELASAN		
						1	2
1	Terwujudnya masyarakat yang sehat mental dan spiritual	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	Sekretariat Daerah (Kesra)	Sekretariat Daerah (Kesra)	Jumlah tempat ibadah x 1000	
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan KH	Badan Pusat Statistik	Hasil perhitungan dan publikasi data Badan Pusat Statistik	Jumlah penduduk
				Angka usia harapan hidup	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola awal tahun menurut umur
2	Menurunnya angka konflik antar agama dan antar etnis	Persentase peningkatan jumlah forum komunikasi antar etnis yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Forum komunikasi agama aktif tahun n - Forum komunikasi agama aktif tahun n-1 x 100	
			Persentase peningkatan jumlah forum komunikasi antar etnis yang aktif	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Forum komunikasi etnis aktif tahun n - Forum komunikasi etnis aktif tahun n-1 x 100
3	Terwujudnya infrastruktur pendidikan yang berkualitas	Angka Partisipasi Sekolah Murni (APS) SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah seluruh murid usia 7-12 tahun di SD/ sederajat x 100 %	
			Angka Partisipasi Sekolah Murni (APS) SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah seluruh murid usia 13-15 tahun di SMP/ sederajat x 100 %
			Angka Partisipasi Sekolah Murni (APS) SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah seluruh murid usia 16-18 tahun di SMA/ sederajat x 100 %
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun x 1000	
					Jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun x 1000	

1	2	3	4	5	6
		5 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Sekolah SMP/ sederajat x 1000 Jumlah seluruh penduduk usia 13-15 tahun
		6 Rasio guru terhadap murid SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Guru SD/ sederajat Jumlah Murid SD/ Sederajat x 1000
		7 Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Guru SMP/ sederajat Jumlah Murid SMP/ Sederajat x 1000
		8 Rasio guru terhadap murid SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Guru SMA/ sederajat Jumlah Murid SMA/ Sederajat x 1000
		9 Kualitas guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah guru berijazah kualifikasi SI/D-IV Jumlah guru pada jenjang SD/MI Jumlah guru u pada jenjang SMP/MTs x 100%
		10 Kualitas guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah guru berijazah kualifikasi SI/D-IV Jumlah guru pada jenjang SMA/MA/SMK x 100%
		11 Kualitas guru yang memenuhi kualifikasi SI/D-IV SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah guru berijazah kualifikasi SI/D-IV Jumlah guru pada jenjang SMA/MA/SMK x 100%
		12 Angka Kelulusan SD/MI	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI x 100% Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya
		13 Angka Kelulusan SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Lulusan pada jenjang SMP/MTs x 100% Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya
		14 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Lulusan pada jenjang SMA/MA/SMK x 100% Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/MA/SMK pada tahun ajaran sebelumnya
4	Terwujudnya infrastruktur kesehatan yang berkualitas dalam mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat	1 Rasio puskesmas, poliklinik, postu per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Puskesmas, poliklinik dan Postu x 1000 Jumlah penduduk x 1000
		2 Rasio rumah sakit per 1000 penduduk	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Rumah Sakit x 1000 Jumlah penduduk x 1000
		3 Rasio dokter per seribu penduduk	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokter x 1000 Jumlah penduduk x 1000
		4 Rasio dokter per seribu penduduk	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah Paramedis x 1000 Jumlah penduduk x 1000
		5 Rasio paramedis per seribu penduduk	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Jumlah paramedis x 1000 Jumlah penduduk x 1000
5	Terwujudnya infrastruktur pasar yang berkualitas dalam mendukung tercapainya kota Singkawang sebagai pusat perdagangan	1 Persentase kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Nilai PDRB dari Perdagangan x 100% Jumlah Total PDRB
		2 Persentase praarana dan sarana bangunan pasar tradisional dalam kondisi	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Jumlah sarana bangunan pasar tradisional dalam kondisi baik x 100% Jumlah total sarana bangunan tradisional
		1 Persentase air baku untuk minimal sehari-hari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Air Baku yang dapat dihasilkan dalam sehari x 100% Kebutuhan air minimal sehari
6	Tercapainya cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat kota	2 Rumah tangga pengguna air bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Pemukiman dan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Pemukiman dan	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih x 100% Jumlah Rumah Tangga

1	2	3	4	5	6
7	Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas dalam mewujudkan Kota Singkawang sebagai pusat jasa, perdagangan, dan agribudaya	1 Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2 Rasio jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup	Parang jalan kondisi baik Parang keseluruhan jalan Parang saluran irigasi Luas lahan budidaya pertanian Jumlah penduduk Parang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik x 1000
8	Terciptanya ekosistem yang kondusif bagi pengembalaan produk-produk unggulan daerah berlandaskan ekowisata	1 Nilai produktivitas total daerah 2 Persentase koperasi aktif	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM	Nilai total produktivitas daerah pada tahun n menurut perhitungan BPS yang diproyeksikan oleh BAPYUDA Kota Singkawang Jumlah koperasi aktif tahun n x 100% Jumlah usaha mikro dan kecil Tahun n Jumlah UKM non BPR/LKM di Kota Singkawang Tahun n Jumlah BPR/LKM di Kota Singkawang Tahun n Jumlah usaha mikro dan kecil Tahun n
9	Terwujudnya akselerasi pertumbuhan ekonomi berbasis kewirausahaan tanpa mengesampingkan aspek pemerataan yang bertandem	1 Nilai Pertumbuhan PDRB 2 Laju Inflasi 3 Angka Kemiskinan 4 Jumlah BPR/ LKM 5 Jumlah usaha mikro dan kecil	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM Dinas Sosial, Pembudayaan, Perencanaan dan Perumahan Pangan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, UKM Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan) Dinas Sosial, Pembudayaan Perumahan dan Perindugan Anak Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Nilai total PDRB Kota Singkawang pada Tahun n berdasarkan data BPS yang diproyeksikan oleh BAPYUDA Kota Singkawang Nilai Implasi Daerah pada tahun n berdasarkan data BPS, Bagian Perencanaan dan TPID Angka Kemiskinan pada Tahun n berdasarkan data BPS dan BAPYUDA Data PDRB per kapita proyeksi BAPYUDA Kota Singkawang Jumlah Balita Gizi Buruk Jumlah balita x 100% Nilai PDRB dari Pertanian Jumlah Total PDRB x 100% Nilai PDRB dari Tanaman Pangan Jumlah Total PDRB x 100% Nilai PDRB dari Perkebunan Jumlah Total PDRB x 100%
10	Terjalinnya pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat	1 Persentase kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB 2 Persentase kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB 3 Persentase kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai PDRB dari Pertanian Jumlah Total PDRB x 100% Nilai PDRB dari Tanaman Pangan Jumlah Total PDRB x 100% Nilai PDRB dari Perkebunan Jumlah Total PDRB x 100%
11	Terjalinnya perbaikan struktur perekonomian daerah yang kokoh sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas (inklusi), berdaya saing global dan menjadi motor penggerak perekonomian	1 Persentase kontribusi sektor pertanian/ perkebunan terhadap PDRB 2 Persentase kontribusi sektor tanaman pangan terhadap PDRB 3 Persentase kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai PDRB dari Pertanian Jumlah Total PDRB x 100% Nilai PDRB dari Tanaman Pangan Jumlah Total PDRB x 100% Nilai PDRB dari Perkebunan Jumlah Total PDRB x 100%

1	2	3	4	5	6
		4 Jumlah produksi perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Jumlah produksi dari sektor perikanan baik tangkap dan budidaya
		5 Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah PDRB dari Pariwisata x 100% Jumlah Total PDRB
12	Tercapainya lingkungan kota yang nyaman dan bebas polusi secara berkelanjutan	1 Persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Luas Ruang Terbuka Hijau x 100% Luas wilayah ber HPL/HGB
		2 Persentase penanaman sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Volume sampah yang dapat diangkut (m3) x 100% Volume produksi sampah
		3 Rasio luas wilayah perkotaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas wilayah pusat kota x 1000 Luas Kota Singkawang keseluruhan
13	Menurunnya kemungkinan terjadinya bencana alam akibat kegagalan perencanaan pembangunan dan pengembangan daerah secara tepat sasaran, terukur, terarah dan berwawasan lingkungan berkelanjutan	1 Persentase pemecaran status matri air	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah kawasan pemukiman/industri dan sumber mata air yang terpadam mutu airnya x 100%
		2 Persentase cakupan pengujian wilayah rawan longsor dan sumber mata air	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah pengujian wilayah rawan longsor dan Sumber Mata air x 100% Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan Sumber Mata air
		3 Persentase cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan andal	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Perencanaan wajib amdal yang diawasi x 100% Jumlah seluruh Perusahaan wajib andal
14	Meningkatkan daya saing daerah dan penciptaan ketidagrasmatan dan ketahanan kota (keseluruhan CIDI)	1 Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Tenaga Kerja Modal dan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Modal dan Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan x 100% Jumlah tenaga kerja terdaftar

1	2	3	4	5	6
					Angkatan kerja usia 15 tahun keatas x 100% Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas Jumlah Polisi Pamong Praja x 10.000 Jumlah penduduk Jumlah Perhimpunan Masyarakat (Limas) x 10.000 Jumlah penduduk x 10.000 Jumlah penyelesaian pengakuan PERDA x 100% Jumlah pelanggaran perda Banyaknya kelompok Patroli x 3 kali Patroli 1 hari x 100% Banyaknya kelompok kecamatan diikuti wilayah kabupaten/kota
15	Terciptanya rasa aman masyarakat dan dunia usaha	1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 2 Jumlah himmas per himmah 10.000 penduduk 3 Persentase cakupan pegejakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 4 Persentase cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda Banyaknya kelompok kecamatan diikuti wilayah kabupaten/kota x 100% Jumlah pelanggaran perda Banyaknya kelompok kecamatan diikuti wilayah kabupaten/kota x 100% Jumlah pelanggaran perda Banyaknya kelompok kecamatan diikuti wilayah kabupaten/kota x 100%
16	Memungkutnya stabilitas daerah guna menampung aktifitas perekonomian masyarakat khususnya dunia investasi dan	1 Jumlah peraturan daerah yang mendukung iklim dan ketertarikan daerah 2 Jumlah dan macam parkir dan ketertarikan daerah 3 Persentase pengakuan cadangan pangan	Dinas Perencanaan Modal dan Tenaga Kerja Badan Kejanggaran Daerah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Dinas Perencanaan Modal dan Tenaga Kerja Badan Kejanggaran Daerah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Peraturan Daerah yang mendukung iklim usaha Jumlah parkir di Kota Singkawang x 100% Jumlah pelanggaran perda Banyaknya kelompok kecamatan diikuti wilayah kabupaten/kota x 100%
17	Menjadikan Kota Singkawang sebagai daerah tujuan wisata yang inovatif, menarik dan tetap bermartabat	1 Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya 2 Jumlah misi kesenian 3 Jumlah gedung kesenian 4 Jumlah kunjungan wisatawan dan olah raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya selama 1 tahun Jumlah misi kesenian yang dilakukan dalam 1 tahun Jumlah gedung kesenian yang ada di Kota Singkawang Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara dalam 1 tahun Jumlah klub olahraga di Kota Singkawang x 1000 Jumlah penduduk Jumlah gedung olahraga di Kota Singkawang x 1000 Jumlah lapangan olahraga di Kota Singkawang x 1000 Jumlah penduduk x 1000
18	Memungkutnya prestasi olahraga Kota Singkawang yang komprehensif	1 Jumlah klub olahraga per 1000 penduduk 2 Jumlah gedung olahraga per 1000 penduduk 3 Jumlah lapangan olahraga per 1000 penduduk	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah klub olahraga di Kota Singkawang x 1000 Jumlah penduduk Jumlah gedung olahraga di Kota Singkawang x 1000 Jumlah lapangan olahraga di Kota Singkawang x 1000 Jumlah penduduk x 1000
19	Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Singkawang	1 Persentase PMKS skala Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 2 Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial 3 Jumlah lapangan olahraga per 1000 penduduk	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial x 100% Jumlah PMKS yang sebenarnya mendapatkan bantuan sosial Jumlah penyandang cacat yang menerima jaminan sosial x 100% Jumlah penyandang cacat yang sebenarnya menerima jaminan sosial Jumlah lapangan olahraga di Kota Singkawang x 1000 Jumlah penduduk x 1000
20	Memungkutnya kinerja aparatur pemerintahan agar lebih profesional dan mengedepankan kinerja	1 Persentase pemenuhan pelanggaran disiplin dan etika PNS 2 Persentase diklat fungsional yang diselenggarakan Pemerintah Kota untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Jumlah pelanggaran disiplin dan etika PNS tahun n-1 x 100% Jumlah pelanggaran disiplin dan etika PNS tahun n-1 x 100% Jumlah diklat fungsional yang diselenggarakan x 100% Jumlah diklat fungsional yang seharusnya dilaksanakan x 100%
21	Terwujudnya kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintahan yang baik, benar, inovatif dan akuntabel	1 Nilai hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan pada tahun 2 Opini BPK terhadap Laporan Pengendalian Keuangan Daerah	Sekretariat Daerah (Organisasi) Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat Kota	Sekretariat Daerah (Organisasi) Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat Kota	Nilai dan predikat hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintahan pada tahun n oleh tim Kewas PAN-RB Opini BPK pada hasil audit terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah pada tahun n

1	2	3	4	5	6
22	Terciptanya peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan dasar dan pelayanan pendukung	1 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja pelayanan masyarakat bidang pendidikan 2 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja pelayanan masyarakat bidang kesehatan 3 Persentase penurunan keluhan publik terhadap kinerja pelayanan masyarakat bidang pekerjaan umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektoriat Kota Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Inspektoriat Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektoriat Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektoriat Kota	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektoriat Kota Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Inspektoriat Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Inspektoriat Kota	$\frac{\text{Jumlah keluhan/Aduan pada tahun n} - \text{jumlah keluhan/aduan n-1}}{\text{jumlah keluhan/aduan n-1}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah keluhan/Aduan pada tahun n} - \text{jumlah keluhan/aduan n-1}}{\text{jumlah keluhan/aduan n-1}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah keluhan/Aduan pada tahun n} - \text{jumlah keluhan/aduan n-1}}{\text{jumlah keluhan/aduan n-1}} \times 100\%$
23	Terciptanya peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan yang memenuhi esas hukum yang berlaku	1 Persentase penurunan kasus/tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 2 Persentase penurunan jumlah regulasi daerah yang dibatalkan atau dicabut	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	$\frac{\text{Jumlah kasus/ tuntutan pada tahun n} - \text{jumlah kasus/tuntutan pada tahun n-1}}{\text{jumlah kasus/tuntutan pada tahun n-1}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah regulasi dibatalkan pada tahun n} - \text{jumlah regulasi dibatalkan pada tahun n-1}}{\text{jumlah regulasi dibatalkan pada tahun n-1}} \times 100\%$

WALIKOTA SINGARAWANG,

rrr

AWANG ISHAK

Selama sesuai dengan aslinya,
 KEMALA LINGCIAN HURUM
 YASMALIZAR, S.H
 NTP 10681016 109803 1 004